Mengenal Neoliberalisme-Pendidikan yang Terjadi di Universitas Hasanuddin

Sulfahmi Amir
Fakultas Hukum

Sebagai Pembuka sebelum membahas tentang Neoliberalisme-Pendidikan, kita perlu mengetahui bahwa liberalisasi dan privatisasi ekonomi sering dipahami sebagai bagian dari fenomena global yang menginginkan pengurangan peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Sedangkan neoliberalisme itu sendiri adalah sebuah paham yang menganggap kehadiran pemerintah dalam sektor ekonomi sebagai hal yang merugikan, merusak, tidak efektif dan menjadi penghambat bagi kesejahteraan ekonomi. Para penganut paham ini berpendapat bahwa pemerintah yang bertindak dengan menggunakan kekuasaannya tidak menciptakan ruang bebas bagi tumbuhnya pasar yang sehat dan bersaing secara adil.¹

Inti ajaran neoliberalisme mencakup prioritas pada pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas sebagai pendorong perkembangan ekonomi, pasar yang beroperasi tanpa hambatan, kebebasan individu dalam melakukan transaksi, pengurangan regulasi pemerintah, dan pembelaan terhadap model pembangunan sosial yang berkembang berdasarkan pengalaman negara Barat yang diyakini dapat diterapkan secara global.

Menurut Davis (2006), neoliberalisme berfungsi sebagai proyek politik dan ekonomi dalam kerangka proyek pembangunan.² Sedangkan Michel Foucault memandang neoliberalisme lebih sebagai bentuk pemerintahan (*governance*) daripada sekadar doktrin ekonomi. Dalam *The Birth of Biopolitics*, ia menjelaskan bahwa neoliberalisme mengatur individu melalui mekanisme pasar, yang membuat setiap orang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka sendiri, sekaligus menormalisasi ketimpangan sebagai konsekuensi alami dari pasar bebas.

Secara umum dapat kita tarik bahwa neoliberalisme adalah sebuah pemahaman atau ideologi, paradigma ekonomi-politik, dan sistem pemerintahan yang menekankan dominasi pasar dalam mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia. Ini mencakup kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi ekonomi melalui deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam mengelola ekonomi dan layanan publik. Dalam konteks ini, pasar dianggap sebagai mekanisme utama untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, sementara individu dipandang sebagai entitas

¹ Ma'rif, Syamsul. 2007. "Neoliberalisme Strategi Kebijakan IMF." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 2 (3): 192.

² Rasyadian, Yuda. 2013. "MERAJUT DENGAN TANAH, MENJEJAK DENGAN SEKOLAH1 "GERAKAN PERLAWANAN ATAS NEOLIBERALISME DI DESA PERTANIAN SARIMUKTI."" *Jurnal RANAH* 3, no. 1 (Mei): 13.

otonom yang bertindak berdasarkan logika keuntungan pribadi dalam kerangka kompetisi bebas.

Dalam praktiknya secara global, salah satu sumber hukum dalam perdagangan internasional berasal dari perjanjian-perjanjian internasional. Salah satu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelaraskan hukum perdagangan internasional serta mengatur tentang liberalisasi perdagangan antara pelaku pasar global adalah *World Trade Organization* (WTO). Di bawah piagam WTO, terdapat berbagai perjanjian perdagangan, salah satunya adalah *General Agreement on Trade in Services* (GATS). GATS dirancang untuk mengatur perdagangan jasa global dan berkomitmen untuk menghilangkan hambatan bagi penyedia jasa asing dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. GATS mencakup 12 sektor jasa yang diatur, antara lain sektor bisnis, keuangan, konstruksi, kesehatan, pendidikan, transportasi, distribusi, lingkungan, pariwisata, olahraga dan budaya, serta komunikasi.³ Namun, pada tulisan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada sektor pendidikan yang menimbulkan banyak permasalahan sampai melupakan esensi dari tujuan pendidikan itu sendiri.

Kemunculan GATS, membuka lebar pintu perekonomian untuk masuk ke segala sektor di negara yang tergabung dalam WTO termasuk Indonesia. Undang-Undang 12 Tahun 2012 Pasal 65 memberikan legalitas kepada Lembaga Pendidikan Tinggi untuk mengatur sendiri perekonomiannya dan memiliki potensi untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor industri, pemerintah, dan lembaga internasional, guna memperluas jaringan dan memperkuat kolaborasi dalam riset dan pengembangan..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan yang diselenggarakan setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis. Pada tahun 2013, tercatat ada 4 PTN yang berganti status menjadi PTN-BH, diantaranya Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM); Selanjutnya pada tahun 2014 ada 3, yakni Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI); Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 2015; Dan Universitas Hasanuddin (UNHAS) menjadi urutan ke-9 secara Nasional dan PTN berstatus Badan Hukum pertama untuk di wilayah Indonesia timur.

Seiring berjalannya Unhas sebagai kampus yang berstatus PTN-BH, tidak berhenti menuai berbagai kontroversi, terutama oleh mahasiswanya. Pertama, persoalan UKT yang mahal sudah akrab di telinga para mahasiswanya. Kedua, kuota penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi terus dipangkas dan tahun ini kuota pada jalur mandiri hampir merata 50% di setiap fakultas melalui Peraturan

³ Hanifah, Safura F., Nurul Aulia, and Ferdiansyah R. 2021. "KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI JASA TELEKOMUNIKASI: GATS, AFAS, DAN ASEAN+." *Intermestic: Journal of International Studies* 5, no. 2 (Mei): 313.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbud Ristek) No. 48 Tahun 2022.⁴ Ketiga dan yang sangat dirasakan oleh seluruh mahasiswa, yakni keterbatasan dalam mengakses fasilitas kampus, mulai dari fasilitas yang tidak dapat digunakan dengan sempurna sampai pembatasan jam beraktifitas di dalam kampus. Alih-alih ingin membangun *branding* hingga di tingkat Internasional dan bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri, justru banyak kekecewaan yang diabaikan.

Pendidikan tinggi di Indonesia seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Namun, masuknya kebijakan neoliberalisme yang diterapkan di Unhas, terutama melalui status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), telah menimbulkan berbagai persoalan yang mengancam prinsip dasar pendidikan sebagai hak yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 PTN-BH memberikan otonomi kepada Unhas untuk mengelola keuangan dan sumber daya secara mandiri, termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Kemandirian dalam mengelola keuangan memiliki potensi untuk membuka ruang bagi komersialisasi pendidikan. Kebijakan ini menyebabkan biaya pendidikan yang tinggi, seperti peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pengenaan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) yang membebani mahasiswa, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, Unhas juga melibatkan privatisasi aset kampus, seperti pembangunan Hotel Unhas & *Convention*, yang mengalihkan fokus universitas dari pendidikan menjadi usaha komersial yang lebih mengutamakan keuntungan finansial. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana, baik yang bersumber dari UKT maupun DPP, semakin memperburuk situasi ini karena mahasiswa tidak diberikan informasi yang jelas mengenai alokasi dana tersebut.

Dampak dari kebijakan neoliberal ini sangat terasa, terutama dalam hal kesenjangan akses pendidikan. Mahasiswa dari kalangan ekonomi lemah terpaksa menunda atau bahkan menghentikan pendidikan mereka karena tidak mampu membayar biaya yang semakin tinggi. Kebijakan ini juga mengarah pada erosi prinsip pendidikan sebagai hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara, menggantikannya dengan pandangan bahwa pendidikan adalah komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial. Hal ini semakin memperburuk ketidakadilan sosial, menciptakan jurang antara mahasiswa yang mampu dan yang tidak, dan menurunkan daya inklusivitas pendidikan tinggi di Unhas. Fokus utama kebijakan ini yang berorientasi pada pendapatan juga menyebabkan degradasi fungsi akademik, di mana kualitas

⁴ Caesaria, Sandra D., and Dian Ihsan. 2023. "21 PTN Punya Kuota 50 Persen pada Jalur Mandiri 2023." Kompas.com. https://www.kompas.com/edu/read/2023/04/12/130000671/21-ptn-punya-kuota-50-persen-pada-jalur-mandiri-2023#google_vignette.

pendidikan dan penelitian menjadi prioritas kedua setelah keuntungan finansial kampus.

Secara hukum, kebijakan yang mendorong komersialisasi pendidikan ini bisa dikritisi berdasarkan sejumlah peraturan yang ada. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 65 Ayat 1 dan 4, menggarisbawahi bahwa pendidikan tinggi harus bermutu dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Kebijakan yang menetapkan biaya tinggi dan pengenaan DPP yang besar jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Begitu juga dengan Pasal 31 Ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak. Kebijakan yang lebih mengutamakan keuntungan finansial dan eksklusivitas pendidikan jelas tidak sesuai dengan kewajiban konstitusional ini. Meskipun Permendikbud Ristek No. 48 Tahun 2022 memberikan keleluasaan kepada PTN-BH untuk menerima mahasiswa melalui jalur mandiri hingga 50%, hal ini justru memperburuk ketidakadilan sosial dan memperbesar jurang kesenjangan di dunia pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial tetap terjaga.

Secara keseluruhan, kebijakan neoliberalisme yang diterapkan di Unhas lebih menekankan pada peningkatan pendapatan finansial kampus daripada menjaga prinsip aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Dampak dari kebijakan ini sangat merugikan mahasiswa dari golongan ekonomi rendah, yang semakin terpinggirkan dari kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Secara hukum, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan UU Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan revisi terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi di Unhas tetap menjadi hak dasar yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Referensi

- Caesaria, Sandra D., and Dian Ihsan. 2023. "21 PTN Punya Kuota 50 Persen pada Jalur Mandiri 2023." Kompas.com.
https://www.kompas.com/edu/read/2023/04/12/130000671/21-ptn-punya-kuota-50-persen-pada-jalur-mandiri-2023#google_vignette.
- Hanifah, Safura F., Nurul Aulia, and Ferdiansyah R. 2021. "KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI JASA TELEKOMUNIKASI: GATS, AFAS, DAN ASEAN+." *Intermestic: Journal of International Studies* 5, no. 2 (Mei): 313. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n2.8>.
- Ma'rif, Syamsul. 2007. "Neoliberalisme Strategi Kebijakan IMF." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 2 (3): 192.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/27695/1/Neoliberalisme%20Strategi%20Kebijakan%20IMF.pdf>.
- Rasyadian, Yuda. 2013. "MERAJUT DENGAN TANAH, MENJEJAK DENGAN SEKOLAH "GERAKAN PERLAWANAN ATAS NEOLIBERALISME DI DESA PERTANIAN SARIMUKTI."” *Jurnal RANAH* 3, no. 1 (Mei): 13. Not Found.